PENGARUH KUALITAS ANGGARAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA JAMBI

Sugiharto[1]

Abstract

The purpose of this study is to analyze and demonstrate empirically on Effect of Budget and Budgetary Control Quality Organizational Effectiveness Against Government within the City of Edinburgh both partial as well . Techniques or methods used in collecting the data in the study with the technique or method of purposive random sampling (purposive sampling / Judgement) conducted by survey method by distributing research instruments / questionnaires to respondents from 39 on education in the workplace Jambi City Government 195 total questionnaires respondents . Distribution of 195 questionnaires , 163 were returned , which can not be processed 32 , and the data that can be processed is 158 questionnaire . Based on the analysis of the data obtained in the description of the results is that the partial hypothesis testing (t-test) showed that the partial hypothesis 1.1 which states that the quality of the budget significantly affect the effectiveness of government organizations and the provincial city hypothesis stating 1.2 budgetary control to significantly affect the effectiveness of government organizations Jambi city is evidenced by the t-test value at α 0.05 is above 1,725 t count on the quality of the budget and budget control 6.195 6.670 . Simultaneous testing (Test - F) , i hypothesis 2 which states that the quality of budget and budgetary control to significantly affect the effectiveness of government organizations Jambi city was evident with the calculated value of F - test results on the α - F 3.14 0.05 above that 163.627 . The role of the quality of budget and budgetary control that influence organizational effectiveness in the provincial city administration has been shown by the evidence that the factors contained in the variable quality of budget and budgetary control is able to significantly positively encourage the creation of organizational effectiveness .

Keyword : Quality Budget, Budgetary Control and Organizational Effectiveness.

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma dalam hal pengelolaan Sistem pemerintahan Daerah yang diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sejak awal era reformasi telah diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. Undang-undang ini memberikan otonomi secara penuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, hingga saat daerah sudah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

Dalam memantapkan kemandirian Pemerintah Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah yang lebih nyata, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Secara praktiknya, Pemerintah Daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing. Kedua undang-undang ini membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien.

Anggaran merupakan suatu pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen tentang rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam suatu periode tertentu, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tersebut (Hanson, 1996). Sedangkan dalam penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, baik manajer

[1] Dosen Tetap STAI Mau'izhah Tanjung Jabung Barat

tingkat atas maupun manajer tingkat bawah dan ini akan berdampak langsung terhadap perilaku manusia, terutama bagi orang yang langsung mempunyai hubungan dengan penyusunan anggaran. Schiff dan Lewin (1970), mengemukakan bahwa anggaran yang telah disusun memiliki dua peranan. Pertama, anggaran dapat berperan sebagai perencanaan dimana anggaran tersebut berisi tentang ringkasan rencana keuangan organisasi dimasa yang akan datang. Kedua, anggaran juga dapat berperan sebagai kriteria kinerja dimana anggaran dipakai sebagai sistem pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial. Anggaran merupakan alat yang dapat dipakai untuk memotivasi kinerja para anggota organisasi (Chow *et al*., 1988). Di samping itu anggaran juga merupakan alat untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, memotivasi dan mengevaluasi prestasi manajer (Kennis, 1979). Dalam studi yang dilakukan Swieringa dan Moncur (1975) ditemukan bahwa karakteristik anggaran sangat dibutuhkan untuk menentukan diterimanya sebuah anggaran oleh *budgetees*. Mereka juga mengatakan bahwa dorongan akan meningkat apabila anggaran yang diterima itu lebih akurat, lebih rasional dan lebih terkendali, sehingga menumbuhkan partisipasi yang tinggi. Terkait dengan fungsi anggaran sebagai sistem pengendalian maka bagi pihak yang melakukan pengawasan terhadap anggaran tersebut, akan lebih efektif bagi mereka dalam menjalankan fungsi pengawasannya ketika anggaran tersebut memenuhi kriteria akurat, rasional dan terkendali.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundangundangan (Syamsi,1986: 199). Larry D Stout (1993) dalam Bastian (2006:275) menyatakan bahwa Pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses. Menurut James B. Whittaker (1993) dalam Akuntansi Sektor Publik (Bastian 2006:275) diyatakan bahwa Pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Organisasi sektor publik (Pemerintah) merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan karena masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik. Sehingga pemerintah tidak hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat saja, tetapi juga kepada masyarakat luas. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan tujuan hasil yang dicapai, sehingga efektivitas memberikan kontribusi terhadap kegiatan yang dicapai. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan pengertian dari pada efektivitas, sebagai berikut: "Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan". (Mahmudi, 2005:92) Suatu organisasi yang efektif adalah yang dapat membuat laporan tentang dirinya dan aktivitas-aktivitasnya menurut cara-cara dalam jumlah-jumlah tersebut dapat diterima. Pandangan ini memahami efektivitas sebagai proses negosiasi yang terus menerus, ketimbang sebagai sesuatu yang diproduksikan. Proses yang dipakai oleh para pimpinan instansi untuk menetapkan efektivitas organisasi mencakup pengamatan terhadap lingkungan yang terus menerus guna menjamin bahwa *output-output* organisasi yang dipakai oleh seorang anggota kelompok dapat diterima. Anggaran yang tepat dalam organisasi sudah menjadi keharusan bila organisasi ingin efektif. Organisasi tidak mungkin efektif bila anggaran tidak mendukung keberadaan organisasi tersebut. Demikian juga dengan pengendalian, untuk menghasilkan efektivitas organisasi yang terbaik dibutuhkan pengendalian yang tepat. Penganggaran Berbasis Kinerja didefenisikan sebagai suatu metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegaitan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program dikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan (Anggarini dan Puranto, 2010).

Pengalokasian dana yang efektif mengandung arti bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan pemerintah mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan stratejik yang dimuat dalam dokumen perencanaan stratejik daerah. Sedangkan,

pengalokasian dana yang efisien mengandung arti bahwa pencapaian sasaran dan tujuan stratejik tersebut telah menggunakan sumber daya yang paling minimal dengan tetap mempertahankan tingkat kualitas yang direncanakan. Pengalokasian pengeluaran yang efektif dan efisien tersebut dapat diwujudkan dengan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. Pengendalian anggaran terhadap Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) selalu dilakukan dengan cara membandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai dan perlu dilakukan analisis *varians* (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depan.

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran), Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan komponan penting untuk menciptakan akuntabilitas sector public dan salah satu alat untuk penilaian kinerja unit.

Proses penyusunan anggaran kinerja termasuk dalam hal pengendalian pelaksanaan kerjanya sangat tergantung pada kualitas dari sumber daya manusianya. Jika kemampuan sumber daya manusianya terbatas, kemungkinan besar hasil dari program-program kerja menjadi tidak efektif dan efisien. Program pendidikan dan pelatihan menjadi bagian yang penting untuk meningkatkan kemampuan sekaligus menggerakkan dan merangsang semangat kerja pegawai dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Nordiawan, dkk, 2009; 27)

Dari hasil penelitian yang sampaikan oleh Robinson (Tahun 2006) yang melakukan penelitian di DPRD Kabupaten dan kota se Propinsi Bengkulu, bahwa secara bersama-sama, kejelasan anggaran, evaluasi anggaran, dan keakuratan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengawasan anggaran. Sedangkan hasil uji interaksi menunjukkan bahwa pengetahuan tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan dalam hubungan antara kualitas anggaran dan efektivitas pengawasan anggaran, tetapi pengetahuan tentang anggaran berpengaruh signifikan secara langsung terhadap efektivitas pengawasan anggaran.

Sejalan dengan fenomena diatas, Utari (2009) dalam penelitiannya di Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah, menyatakan bahwa dalam praktek penyusunan anggaran masih banyak ditemukan gejala penggunaan pendekatan traditional budget atau line item, antara lain adanya pencantuman indikator kinerja (input, *output dan outcome*), yang tidak jelas ukuran dan stándar biayannya. Dengan kata lain proses penyusunan anggaran belum menggunakan Sistem anggran berbasis kinerja. Hal ini berdampak pada kualitas pelaporan penggunaan anggaran. Lucyanda dan Sari (2009) menemukan bukti bahwa kualitas anggaran dipengaruhi oleh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakan dan dan transparansi anggaran. Cipta (2011) menyimpulkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja belum terpenuhi.

Dengan meninjau pada aspek akuntabilitas akuntansi, Herawati (2011) menyatakan hasil penelitian di Instansi Perintahan Kota Jambi bahwa secara simultan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah mempunyai pengaruh positif signifikan. Secara parsial yang memiliki pengaruh negatif yaitu Kejelasan sasaran anggaran dan Pengendalian akuntansi. Namun penelitian ini belum melihat tentang kualitas dan kinerja serta pengendalian anggaran sebagai salah satu indikator efetivitas kerja di Pemerintahan Kota Jambi terlebih jika dilihat dari kepiawaian pengelolaan keuangan dilingkungan yang bersangkutan.

Selanjutnya Asmoko (2006) menyatakan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas pengendalian keuangan dan kinerja. Alim (2008) juga mengungkapkan bahwa partisipasi, sasaran, revisi dan evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial, termasuk kecukupan anggaran ikut mempengaruhi kinerja manajerial (Sinuraya, 2009). Kinerja manajerial. Ramandei (2009) menambahkan variabel karakteristik sasaran anggaran dan sistem pengendalian Intern mempengaruhi Kinerja Manajerial.

Dari beberapa penelitian tentang faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi terdiri dari Karakteristik organisasi, kebijakan dan praktek

manajemen, dan faktor produksi (Abidin, 2002), Partisipasi anggaran dan keterlibatan kerja (Rahman dan Supomo, 2003), struktur, iklim organisasi dan kepemimpinan (Chabib, 2006), motivasi, kepemimpinan, dan disiplin pegawai (Purnomo, 2006), budaya organisasi (Wijaya, 2007), Partisipasi dan profesionalisme aparat (Santoso, 2009), restrukturisasi organisasi (Primasari, 2011) dan formasi pegawai, sumber daya manusia, struktur organisasi, anggaran, sekretiaris non PNS dan sarana prasarana (Fitha, 2011) serta Iklim organisasi, etos kerja, disiplin kerja (Syahiruddin, 2012).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji dan membahas lebih lanjut mengenai Pengaruh Kualitas Anggaran dan Pengendalian Anggaran terhadap Efektivitas Organisasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Jambi. Bertitik tolak dari latar belakang penelitian diatas, penelitian mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kualitas Anggaran dan Pengendalian Anggaran berpengaruh signifikan Terhadap Efektivitas Organisasi di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi secara parsial ?
2. Apakah Pengendalian Anggaran dan Pengendalian Anggaran berpengaruh signifikan Terhadap Efektivitas Organisasi di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi secara simultan?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas yang sekaligus membatasi ruang lingkup penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah :

1 Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris tentang Kualitas Anggaran dan Pengendalian Anggaran berpengaruh signifikan Terhadap Efektivitas Organisasi di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi secara parsial.

2 Untuk menganalisis Kualitas Anggaran dan Pengendalian Anggaran berpengaruh signifikan Terhadap Efektivitas Organisasi di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi secara simultan.

Rumusan masalah serta tujuan penelitan ini maka peneliti mengajukan beberapa hipotesis berikut :

1 Pengaruh Kualitas Anggaran dan Pengendalian Anggaran Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Efektivitas Organisasi di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi.

$H_{1.1}$ *Kualitas Anggaran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi secara parsial.*

$H_{1.2}$ *Pengendalian Anggaran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi secara parsial.*

2 Kualitas Anggaran dan Pengendalian Anggaran Berpengaruh Terhadap Efektivitas Organisasi di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi Secara Simultan.

H2 *: Kualitas anggaran dan pengendalian anggaran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi di lingkuan pemerintahan Kota Jambi secara simultan.*

Dari Hipotesis diatas, penulis mengelompokan kualitas anggaran menjadi variabel bebas 1 (X_1) dan pengendalian anggaran menjadi variabel bebas 2 (X_2) yang mempengaruhi efektivitas organisasi sebagai variabel terikat (Y).

Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Pemerintahan Kota Jambi yang terdiri dari 39 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Jambi meliputi : Dua sekretariat, 8 Badan dan 15 Dinas serta 4 kantor dan 8 kecamatan dilingkungan Pemerintahan Kota Jambi. Dari ke-39 SKPD Kota Jambi tersebut, jumlah responden yang dijadikan sampel penelitian adalah 5 orang dari setiap SKPD, sehingga jumlah seluruh responden yang dijadikan sampel adalah 195 orang dengan pertimbangan ke-5 orang responden setiap SKPD tersebut secara representatif mempunyai hubungan yang erat dengan pertanggungjawab berwenang dibidang keuangan di masing-masing SKPD yaitu pimpinan, bendahara atau pemegang kas dan kepala bagian keuangan dan dua orang staf bidang keuangan.

HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan kealamiahan tempat penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian survey. Metode survey digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu (Sugiyono, 2012 : 6). Selanjutnya metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan pendekatan survey ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan Statistik (Sugiyono, 2012 : 7)

a. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas instrumen pengukuran dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Dalam output SPSS, analisis item/butir tersebut dinyatakan sebagai *Corrected Item-Total Correlation* dan batas kritis untuk menunjukkan item yang valid pada umumnya adalah 0,30. Sehingga nilai *Corrected Item-Total Correlation* di atas 0,30 menunjukkan item yang valid/sahih (Ghozali, 2005).

Dari hasil perhitungan program SPSS, ditunjukan oleh tabel 1 berikut :

Tabel 1 Validitas Data Sampel Kualitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	158	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	158	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Sumber : data diolah,2013

Berdasarkan pengukuran dari nilai *Corrected Item-Total Correlation* ditemukan bahwa validitas data sampel kualitas anggaran dan pengendalian anggaran pemerintahan kota Jambi adalah valid dengan nilai *Corrected Item-Total Correlation* di atas 0,30 yaitu masing-masing kualitas anggaran 0,807, pengendalian anggaran 0,792, dan efektivitas organisasi 0,820 seperti tabel 2 berikut :

Tabel 2 Pengukuran Validitas Data Sampel Berdasarkan nilai *Corrected Item-Total Correlation*

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	**Corrected Item-Total Correlation**	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kualitas_Angg	84,5633	81,369	**,807**	,657	,856
Kendali_Angg	108,6646	170,887	**,792**	,646	,735
Efek_Organisasi	126,0886	192,922	**,820**	,679	,778

Sumber : data diolah,2013

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Dalam penelitian ini pengukuran konsistensi tanggapan responden (*internal consistency*) menggunakan koefisien *alpha cronbach*. Ambang batas koefisien alpha yang digunakan dalam penelitian ini adalah >0,6 sebagaimana disarankan oleh Hair *et al*. (1995). Dari hasil perhitungan program SPSS, diketahui koefisien *alpha cronbach* sebesar 0,839 > 0,6 seperti ditampilkan pada tabel 3 berikut :

Tabel 3 Reliabilitas Data Sampel Kualitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,839	,906	3

Sumber : Data diolah, 2013

b. Pengujian Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan teknik *Uji Kolmogorov-Smirnov* (Uji K-S) dan sebagai dasar penolakan atau penerimaan keputusan normal tidaknya distribusi data ditetapkan pada taraf *signifikan* alpha 0,05. Data terdistrbusi normal jika nilai probabilitas Z (normal) berada antara atau sama dengan 0 dan1,96 atau Pr($0 \leq Z \leq 1,96$). Lihat tabel 4 diketahui :

Tabel 4 Hasil Pengolah Data SPSS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Kualitas_Angg	Kendali_Angg	Efek_Organisasi
N		158	158	158
Normal Parameters[a,b]	Mean	75,0949	50,9937	33,5696
	Std. Deviation	9,46989	5,30652	4,28650
Most Extreme Differences	Absolute	,091	,138	,141
	Positive	,067	,115	,077
	Negative	-,091	-,138	-,141
Kolmogorov-Smirnov Z		**1,143**	**1,739**	**1,776**
Asymp. Sig. (2-tailed)		,147	,005	,004

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada tabel 4 diatas diketahui bahwa nilai Z pada uji Kolmogorov-Smirnov untuk masing-masing variabel kualitas anggaran 1,143 , pengendalian anggaran 1,739 dan efektivitas organisasi 1,776, ketiga angka lebih kecil dari 1,96 berarti bahwa data model tersebut terdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Metode untuk mendiagnose adanya *multicollinearity* dilakukan dengan diduganya korelasi (r) diatas 0,70 (Singgih Santoso, 1999 : 262). Hasil yang diperoleh dari program SPSS tentang nilai uji multikolinearitas dijelaskan dalam tabel 5 berikut ini :

Tabel 5 Hasil Pengujian Multikolinearitas

Collinearity Diagnostics[a]

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions (Constant)	Kualitas_Angg	Kendali_Angg
1	1	2,989	1,000	,00	,00	,00
	2	**,008**	19,273	,79	,31	,02
	3	**,003**	31,342	,21	,69	,98

a. Dependent Variable: Efek_Organisasi

Dari tabel 5 diketahui bahwa koefisien korelasi yang ditunjukan oleh Eigenvalue adalah 0,008 dan 0.003 < 0,7 berarti bahwa pada model ini **tidak terdapat multikolineritas** antar variabel independennya.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi adanya penyebaran atau pancaran dari variabel-variabel.. Model regressi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil yang diperoleh dari program SPSS dijelaskan pada tabel :

Tabel 6 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	24,2680	39,8049	33,5696	3,53108	158
Residual	-5,24342	6,66682	,00000	2,43014	158
Std. Predicted Value	-2,634	1,766	,000	1,000	158
Std. Residual	-2,144	**2,726**	,000	,994	158

a. Dependent Variable: Efek_Organisasi

Dari tabel 6 diketahui bahwa Standar Residual menunjukan angka maximum adalah 2,726 atau berada dibawah nilai kritis pada α 5% dan df=1 yaitu 3,8414 (2,726 < 3,8414) berarti bahwa residual model **tidak termasuk heteroskedastisitas**.

4) Uji Autokorelasi

Untuk menguji keberadaan *autocorrelation* dalam penelitian ini digunakan metode *Durbin-Watson test*, dimana angka-angka yang diperlukan dalam metode tersebut adalah *dl*, *du*, 4 – *dl*, dan 4 – *du*. Jika nilainya mendekati 2 maka tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya jika mendekati 0 atau 4 maka terjadi autokorelasi (+/-). Informasi pada tabel 7 berikut ini diketahui bahwa nilai Durbin-Watson adalah 1,767. Nilai ini mendekat nilai 2 positif, artinya bahwa model regresi **tidak mengandung unsur autokorelasi**.

Tabel 7 Hasil Perhitungan SPSS Uji Autokorelasi Metode Durbin-Watson

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,824[a]	**,679**	,674	2,44577	1,767

a. Predictors: (Constant), Kendali_Angg, Kualitas_Angg
b. Dependent Variable: Efek_Organisasi

c. Pengujian Statistik

1) Analisis Regresi

Dari hasil perhitungan program SPSS, diketahui bahwa hasil regresi linear sebagaimana disajikan dalam tabel 8 berikut ini :

Tabel 8 Persamaan Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,557	1,899		**,294**	,769		
	Kualitas_Angg	,207	,031	,457	**6,670**	,000	,442	2,263
	Kendali_Angg	,343	,055	,424	**6,195**	,000	,442	2,263

a. Dependent Variabel : Efek_Organisasi

Sehingga Persamaan Regresi :

$Y = 0{,}557 + 0{,}0207\ X_1 + 0{,}343\ X_2$

Dimana :

Y = Efektivitas Organisasi

X_1 = Kualitas Anggaran

X_2 = Pengendalian Anggaran

a = konstanta

b_1 = koefisien regresi X_1

b_2 = koefisien regresi X_2

Dari persamaan dijelaskan bahwa setiap 1 satuan kualitas anggaran menyebabkan perubahan sebesar 0,207 satuan efektivitas organisasi pemerintahan kota Jambi dan 1 satuan pengendalian anggaran menyebabkan perubahan sebesar 0,343 satuan efektivitas organisasi pemerintahan kota Jambi. Hubungan variabel bebas dan variabel terikat adalah signifikan positif, ditunjukan oleh p-value (sig.) 0,000 < α 5%. Hasil analisis regresi pada tabel 8 di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,207 untuk variabel Kualitas Anggaran dan 0,343 untuk variabel Penganggaran Anggaran dengan tingkat probabilitas 0,000 yang berarti signifikan (p < 0,05). Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel kualitas anggaran dan pengendalian anggaran terhadap variabel efektivitas organisasi.

2) Nilai Determinasi (r^2)

Uji determinasi (r^2) adalah hasil analisis regresi yang menunjukkan sifat persamaan regresi yang ada antara variabel bebas dan variabel terikat, semakin tinggi koefisien determinasinya maka persamaan regresi tersebut semakin baik. Hasil yang diperoleh dari program SPSS berupa tingkat persamaan sifat yang mampu dijelaskan oleh variabel independent terhadap variabel dependent ditunjukan besaran nilai determinasinya dikemukakan dalam tabel diatas, diketahui nilai koefisien determinasinya yang ditunjukan oleh r^2 (R-Square) adalah **0,679** atau **67,9%,** hal ini berarti bahwa variabel bebas (kualitas anggaran dan pengendalian anggaran) mampu menjelaskan variabel terikat (efektivitas organisasi) Pemerintahan Kota Jambi adalah sebesar 67,9%, sedangkan sisanya 33,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model persamaan. Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas organisasi yang tidak masuk dalam model persamaan atau diluar model persamaan ini meliputi karakteristik organisasi, kebijakan dan praktek manajemen, dan faktor produksi (Abidin, 2002), Struktur organisasi, Iklim organisasi, dan kepemimpinan (Chatib, 2006), motivasi pegawai dan disiplin kerja (Purnomo, 2006), budaya organisasi (Wijaya, 2007), formasi pegawai, kualitas sumber daya manusia, sarana dan

prasarana (Fitha,2011) dan Etos kerja serta disiplin kerja (Syahiruddin,2012)

d. Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap masing-masing hipotesis yang diajukan dapat dilakukan dengan cara Uji signifikansi (pengaruh nyata) variabel independen (Xi) terhadap variabel dependen (Y) baik secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji-t pada level 5% (α = 0,05). Jika t-hitung > t-tabel (α, n-k-l), maka H_0 ditolak; dan Jika t-hitung < t-tabel (α, n-k-l), maka H_0 diterima. Jika dilihat pada tabel diatas, diperoleh nilai t hitung kualitas anggaran sebesar 6,670 dan pengendalian anggaran sebesar 6,195 dengan signifikansi 0,000. Ternyata jauh lebih tinggi dari nilai t tabel (satu sisi atau α2=0,05) adalah 1.725 (atau 6,670 dan 6,195 > 1.725) maka berada pada daerah H_0 ditolak dan Ha diterima. Artinya Secara parsial, Kualitas Anggaran dan Pengendalian Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Organisasi Pemerintahan Kota Jambi. Dengan demikian rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terjawab.

Hipotesis 1.1 ($H_{1.1}$) yang menyatakan bahwa Kualitas Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas organisasi Pemerintahan Kota Jambi adalah terbukti, hal ini ditunjukan oleh :

1. Dukungan perilaku pelaksanaan yang memahami arti pentingnya kecakapan kerja tim dalam menyusun dan melaksanakan anggaran dengan melibatkan pihak manajemen dan partisipasi masyarakat.
2. Pemahaman arti pentingnya isi anggaran terutama yang berhubungan dengan realitas data dan tujuan anggaran, informasi kebijakan pemerintah, asas keadilan dan realisasi serta mekanisme anggaran yang sesuai dengan anggaran berbasis kinerja.
3. Ketersediaan dana dan pengelolaan yang efisien.
4. Anggaran mampu memberikan manfaat yang didukung oleh keterarahan program anggaran, sistem penilaian, motivasi dan tanggung jawab yang jelas serta pemanfaatan alat bantu pembelajaran dengan program tersusun dan terrencana.

Namun ada beberapa hal atau faktor yang perlu ditingkatkan lagi agar kualitas anggaran di pemerintahan kota Jambi lebih terjamin dan dapat ditingkatkan yaitu :

1. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam penyusunan anggaran.
2. Tumbuhkan motivasi pelaksana dengan dasar asas keadilan anggaran.
3. Terjaminnya kecukupan dana anggaran sampai seluruh program kegiatan terrealisasi.
4. Analisis tingkat kebutuhan pegawai perlu dilakukan agar manfaat anggaran tertuju pada semua pihak.

Hipotesis 1.2 ($H_{1.2}$) yang menyatakan bahwa Pengendalian Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas organisasi Pemerintahan Kota Jambi adalah terbukti, hal ini ditunjukkan oleh :

1. Pencapaian tujuan yang tertib administrasi, tepat mutu dan tepat waktu dan sasaran.
2. Pelaksanaan proses pengendali berjalan cukup baik mulai dari pembinaan pemegang kas/bendahara, laporan pertanggung jawaban, pengendalian kegiatan dilapangan dan secara priodik.
3. Setiap komponen yang melaksana fungsi pengendalian telah mampu mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dan memperbaiki penyimpangan tersebut didukung oleh dinamisasi organisasi dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Namun ada beberapa hal atau faktor yang perlu ditingkatkan lagi agar pengendalian anggaran di pemerintahan kota Jambi dapat ditingkatkan yaitu :

1. Ketepatan waktu pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan program anggaran.
2. Peranan rapat koodinasi ekternal perlu ditingkatkan.
3. Dinamisasi organisasi perlu ditingkatkan dengan menciptakan iklim, budaya dan komitmen organisasi yang kondusif.

Uji Simultan digunakan untuk menguji keberartian pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen adalah dengan menggunakan uji-F. Jika F-hitung > F-tabel (α, k-1, n-l), maka H_0 ditolak; dan Jika F-hitung < F-tabel (α, k-l, n-k), maka H_0 diterima. Untuk mengetahui besaran F hitung, dapat dilihat hasil olahan data dari program SPSS pada tabel 9 berikut :

Tabel 9 Hasil Pengolah Data Program SPSS
Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji-F)

Model	R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
			R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,679	2,44577	,679	163,627	2	155	,000

Jika dilihat pada tabel 9 diatas, diperoleh nilai F hitung 163,627 dengan signifikansi 0,000. ternyata lebih tinggi dari nilai F tabel (satu sisi atau α=0,05) adalah 3,14 (atau 163,627 > 3,14) maka berada pada daerah H_0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian rumusan masalah dan hipotesis penelitian ini terjawab, sehingga :

H2 : Kualitas Anggaran dan Pengendalian Anggaran berpengaruh yang signifikan

terhadap Efektivitas Organisasi Pemerintahan Kota Jambi secara simultan.

Peran serta kualitas anggaran dan pengendalian anggaran yang mempengaruhi efektivitas organisasi di lingkungan pemerintahan kota Jambi telah ditunjukan oleh bukti-bukti bahwa faktor-faktor yang terdapat dalam variabel kualitas anggaran dan pengendalian anggaran mampu secara signifikan positif mendorong terciptanya efektivitas organisasinya. Apabila terjadi peningkatan kualitas dan pengendalian anggaran secara serentak (bersamaan) maka akan meningkatkan indikator efektivitas organisasi pemerintahan kota Jambi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab IV dan sesuai dengan rumusan dan tujuan serta hipotesis pada penelitian ini, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan :

1. Bahwa secara parsial hipotesis 1.1 yang menyatakan bahwa kualitas anggaran secara signifikan mempengaruhi efektivitas organisasi pemerintahan kota Jambi dan hipotesis 1.2 yang menyatakan pengendalian anggaran secara signifikan mempengaruhi efektivitas organisasi pemerintahan kota Jambi adalah terbukti dengan nilai uji-t pada α 0,05 diatas 1.725 yaitu t-hitung pada kualitas anggaran 6,670 dan pengendalian anggaran 6,195. Dukungan perilaku pelaksanaan dalam menyusun anggaran, realitas data dan tujuan anggaran, informasi kebijakan pemerintah, asas keadilan dan realisasi serta mekanisme anggaran dan keterarahan program anggaran, sistem penilaian, motivasi dan tanggung jawab yang jelas serta pemanfaatan alat bantu pembelajaran**,** memberikan manfaat yang cukup baik dalam pencapaian kualitas anggaran. Sistem pengendalian juga didukung oleh Pencapaian tujuan yang tertib administrasi, tepat mutu dan tepat waktu serta tepat sasaran, pembinaan pemegang kas/bendahara, laporan pertanggung jawaban, pengendalian kegiatan dilapangan dan secara priodik, serta mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dan memperbaiki penyimpangan tersebut didukung oleh dinamisasi organisasi dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
2. Bahwa secara simultan (Uji-F) diketahui hipotesis 2 yang menyatakan bahwa kualitas anggaran dan pengendalian anggaran secara signifikan mempengaruhi efektivitas organisasi pemerintahan kota Jambi adalah terbukti dengan nilai F-hitung pada hasil uji-F pada α 0,05 diatas 3,14 yaitu 163,627. Faktor-faktor yang terdapat dalam variabel kualitas anggaran dan pengendalian anggaran mampu secara signifikan positif mendorong terciptanya efektivitas organisasinya. Apabila terjadi peningkatan kualitas dan pengendalian anggaran secara serentak (bersamaan) maka akan meningkatkan indikator efektivitas organisasi pemerintahan kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zafar 2002, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Badan Usaha Milik Daerah di Propinsi Jawa Tengah*, Tesis, Un Dip Semarang

Alim, M. Nizarul. 2008, *Efektivitas Perpaduan Komponen Anggaran Dalam Prosedur Anggaran: Pengujian Kontinjensi Matching*, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 10, No. 2, November 2008: 69-76

Asmoko, Hindri. 2006. *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian (Studi Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten dan Sragen, Propinsi Jawa Tengah)*, Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2, No.2, November 2006 Hal. 53-64

Chabib, Moch. 2006, *Analisis Efektivitas Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah*, Tesis Universitas Diponegoro Semarang

Fitha, Ayu Bony Dwi. 2011, *Efektivitas Organisasi Pemerintah Nagari Di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung*, Tesis.

Ginting, Hartika Sari. 2009, Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Perangkat Daerah Di Pemerintahan Kabupatan Karo, Tesis Universitas Sumatera Utara Medan

Kusumaningrum, Indraswari. 2010, *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*, Tesis Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.*Penerbit Andi. Yogyakarta

Nafarin M, 2005, *Penganggaran Perusahaan,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik.,* Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Ramandei, Pilipus. 2009, *Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja*

Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura), Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Robinson. 2006. *Pengaruh Kualitas Anggaran Terhadap Efektivitas Pengawasan Anggaran : Pengetahuan Tentang Anggaran Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten & Kota Se-Propinsi Bengkulu),* Tesis, Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Rofai, Achmad. 2006. *Analisis factor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat Provinsi Jawa Tengah*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Steers, Richard M. 1995. *Efektivitas Organisasi,* Edisi Pertama, Erlangga, Jakarta

Suwardjono. 2011, *Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga, Penerbit BPFE Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Utari, Nuraeni. 2009, *Studi Fenomenologis Tentang Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung,* Tesis Universitas Diponegoro.

Yuwono, Teguh, dkk. 2003, *Otonomi Daerah, Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lokal,* Puskodak Undip, Semarang

Welsch, Hilton, Gordon. 2000. *Anggaran : Perencanaan dan pengendalian laba*. Edisi bahasa Indonesia, Jilid 1, Penerbit Salemba Empat Jakarta.

Wijaya, Stevanus Wisnu. 2007, *Budaya Organisasi Dan Efektifitas Penerapan E-Government (Indonesia),* Jurnal SNATI Yogyakarta 16 Juni 2007 Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.